

Sri Rezki. NPM 18.12.0198. Kepemimpinan Dalam Memotivasi Kedisiplinan Pegawai Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Balangan.

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat memiliki peran sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah juga, memiliki peran yang sangat strategis baik itu dilihat dari aspek manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah. Tugas dan fungsi inspektorat kabupaten adalah melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah kabupaten. *Kata kunci: Inspektorat, Pengawas, kabupaten tanahumbu.*

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat memiliki peran sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah juga, memiliki peran yang sangat strategis baik itu dilihat dari aspek manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah.

Pengawasan pada dasarnya adalah suatu tindakan menilai /menguji apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditentukan sebelumnya. Menggunakan cara pengawasan tersebut akan dapat menemukan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya kesalahan tersebut akan diperbaiki dan hal yang terpenting kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali (Teguh Yuwono,2019:61).

Dalam meningkatkan efisien dan efektifitas pelaksanaan pemerintah daerah maka perlu partisipasi semua pihak termasuk masyarakat ,terlebih aparat pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif adalah kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang

ini. Arah pendekatan yaitu difokuskan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintah.

Hal ini ditandai dengan munculnya tuntutan dari masyarakat yang akan menunjang terbentuknya aparatur pemerintahan yang berwibawa dan bersih, tertib dan teratur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan dari masyarakat itu timbul karena adanya sebab, yaitu adanya perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang ditunjukkan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyimpangan-penyimpangan yang sering ditemui dalam proses pemerintahan daerah, salah satunya karena pelaksanaan pengawasan yang kurang efektif dilakukan oleh badan yang ada dalam lingkup pemerintah daerah. Victor (1994:28).

Landasan hukum yang menjadi acuan pada pelaksanaan pengawasan yaitu berdasar pada undang-undang No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggungjawab setiap tingkat manapun. Hakikat pengawasan yaitu untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan serta kegagalan dalam rangka proses pencapaian tujuan dan sasaran serta dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sebagai bagian dari kegiatan dan tanggung jawab pimpinan, sasaran pengawasan yaitu untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Hasil dari pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam proses pengambilan keputusan, antara lain: a). Menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban. b). Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut. c). Mencari alternatif yang lebih baik atau mengembangkan yang telah baik dalam mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Dalam sistem administrasi negara/manajemen pemerintah, pengawas bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan. Adapun sasarannya adalah: a). Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilakukan secara tertib yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku serta pada sendi-sendi yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercapai nilai guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya. b). Agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpul berasal dari hasil wawancara, observasi secara langsung, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumentasi resmi lainnya.

3.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu tipe penelitian fenomenologi, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas kinerja pegawai Inspektorat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, hal ini disebabkan karna Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah yang memiliki misi yang ingin dicapai yaitu pencegahan terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Melihat begitu pentingnya pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah maka perlu pula kinerja yang baik dari

pelaksananya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kinerja pegawai Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

3.4 Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi obyek dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto dkk,2017. *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*, Yogyakarta:, PSSK UGM.

Basiro, Djawaria, 2018. Kinerja inspektorat daerah propinsi sulawesi selatan, katalogis vol 3 no.5.

Bastian Indra, 2016. *Akuntansi sektor publik*, Yogyakarta:BPFF UGM

Fahmi Irfan, 2018. *Manajemen kepemimpinan teori dan aplikasi cetakan pertama*, Bandung :Alfabeta.

Hartini endang, 2017. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka optimalisasi kerjadi inspektorat daerah kabupaten kutai barat, jurnal administrasi reform vol 3 no. 5.

Hasibuan, Melayu S.P,2017. *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Hasibuan,Melayu S.P, 2017. *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Kadarman.2017.*Pengantar ilmu manajemen*, Jakarta: Prenhalindo.

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam dimensi strategis administrasi publik konsep, teori, isu*, Gava Media: Yogyakarta.

Pasolong, Herbani,2017. *Teori-teori administrasi publik*, Bandung :Alfabet.

Sarwanto, 2018. *Dasar-dasar organisasi dan manajemen*, Jakarta :Ghaliai

S Handayani,J Saleh, A Maruf, 2018. Pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah di kota Makassar, jurnal administrasi publik, vol 4 no.2.

Simanjuntak, 2017. *Manajemen dan evaluasi kinerja*, Jakarta : Fakultas ekonomi universitas indonesia.

Situmorang, viktor M dan Juhir, Jusuf, 1994. *Aspek hukum Pengawasan melekat* , Jakarta : Rineka cipta.

Sondang P. Siagian, 2017. *Manajemen sumber daya manusia* , Jakarta :Bumi Aksara

Sugiyono,2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung :Alfabeta

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah. 2017, *Pengantar manajemen edisi pertama*, Jakarta : Pranada media.

Perda No 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tangkilisan , Hessel Nogi S. 2018. *Manajemen publik*. Jakarta: PT. Gramedia: Pustaka

Teguh Yunowo, 2017. *Manajemen otonomi daerah, pusat kajian otonomi daerah dan kebijakan publik* (PUSKODAK), Semarang : UNDIF

Victory M, Situmorang, Jusuf Juhir, *Hukum pengawasan melekat*, Yogyakarta : Rineka cipta.

Widowati Nina, Amini, 2018. *Kinerja Inspektorat Propinsi Jawa Tengah*

Yazid Muhammad, 2009. *Kinerja dan pengukuran dalam organisasi*, Jakarta : Gramedia widia.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.